



Kepentingan Nasional Indonesia dalam Keanggotaan BRICS terhadap Ekonomi Nasional Tahun 2023-2024

Salma Alfiana^{1*}

¹Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Indonesia

*Penulis Korespondensi: salmaalfiana1510@gmail.com¹

Abstract. *This study examines Indonesia's national interests in BRICS membership for the national economy in 2023–2024. Indonesia has officially announced its readiness to join BRICS, which emphasizes the principles of free and active participation and a multipolar orientation in the global economy. This study aims to analyze how Indonesia's involvement in economic cooperation forums for developing countries such as BRICS can influence the direction of development and national economic interests, both in terms of opportunities and risks. This study uses a qualitative-descriptive approach using literature study and interviews. The theories used are Neoliberal Institutionalism, Regional Economic Integration, and National Interest as the basis for explaining Indonesia's involvement in international cooperation. The results show that Indonesia's membership in BRICS has the potential to expand access to development financing through the New Development Bank (NDB), strengthen trade and investment with BRICS member countries, and enhance leading sectors such as the manufacturing industry and agriculture, which have shown significant export increases, especially to BRICS member countries. However, there are risks that must be anticipated, such as the dominance of large countries in BRICS, the potential for new economic dependencies, and geopolitical friction with Western countries. BRICS membership can be an opportunity for Indonesia's national development if managed carefully, selectively, and with a focus on long-term interests.*

Keywords: BRICS; Economy; Indonesia; National Interests; Regional Economic Integration

Abstrak. Penelitian ini membahas kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS terhadap ekonomi nasional pada tahun 2023–2024. Indonesia secara resmi mengumumkan kesiapannya untuk bergabung dengan BRICS yang menekankan prinsip bebas aktif serta orientasi multipolar dalam ekonomi dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi negara-negara berkembang seperti BRICS dapat mempengaruhi arah pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional, baik dari sisi peluang maupun risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori Neoliberal Institusionalisme, Integrasi Ekonomi Regional dan National Interest sebagai dasar untuk menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi memperluas akses terhadap pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank (NDB), memperkuat perdagangan dan investasi dengan negara anggota BRICS, serta meningkatkan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pertanian menunjukkan peningkatan ekspor yang signifikan, terutama ke negara-negara anggota BRICS. Namun demikian, terdapat risiko yang harus diantisipasi, seperti dominasi negara besar dalam BRICS, potensi ketergantungan ekonomi baru, dan gesekan geopolitik dengan negara-negara Barat. Keanggotaan BRICS dapat menjadi peluang bagi pembangunan nasional Indonesia apabila dikelola secara cermat, selektif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Kata kunci: BRICS; Ekonomi; Indonesia; Integrasi Ekonomi Regional; Kepentingan Nasional

1. LATAR BELAKANG

Perubahan konstelasi politik dan ekonomi global dalam beberapa terakhir ini menunjukkan pergeseran dari orientasi politik dan keamanan menuju fokus pada bidang ekonomi. Pergeseran ini ditandai dengan melemahnya dominasi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, serta meningkatnya kontribusi negara-negara berkembang yang dikenal sebagai emerging economies. Salah satu kelompok yang paling menonjol adalah BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sejak pembentukannya, BRICS telah merepresentasikan hampir 37% Produk Domestik Bruto

(PDB) dunia dan lebih dari 40% populasi global, menjadikannya blok ekonomi dengan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola global.

Keberadaan BRICS tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi multipolar, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi institusi keuangan global yang selama ini didominasi Barat, seperti IMF dan Bank Dunia. BRICS mendorong agenda reformasi tata kelola ekonomi internasional yang lebih inklusif melalui pembentukan *New Development Bank* (NDB) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, serta *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kemitraan setara, BRICS semakin strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 memiliki kepentingan untuk memperluas jaringan kerja sama internasional. Pada 2023, Indonesia menerima undangan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan secara aktif menunjukkan minat melalui partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat kolaborasi multilateral, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan akses terhadap pendanaan pembangunan. Akhirnya, pada Januari 2025, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS, menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam blok tersebut.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS memiliki landasan strategis. Dari sisi peluang, keanggotaan ini membuka akses terhadap pendanaan internasional melalui NDB, memperluas pasar ekspor non-tradisional, serta meningkatkan posisi tawar dalam perundingan ekonomi global. Diversifikasi mitra dagang melalui BRICS juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan perdagangan, terutama terkait kebijakan ekspor Indonesia. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia berpotensi memperkuat kerja sama investasi, memperluas jaringan perdagangan, serta mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Namun demikian, keanggotaan ini juga tidak terlepas dari tantangan. Ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap sesama anggota BRICS, khususnya Tiongkok, dapat menciptakan pola ketergantungan baru yang berisiko mengurangi otonomi ekonomi nasional. Selain itu, dominasi negara besar dalam pengambilan keputusan berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan. Persaingan intra-BRICS dalam sektor strategis, serta tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan agenda kolektif, juga menjadi isu yang perlu diantisipasi. Lebih jauh, keanggotaan Indonesia dalam BRICS

berpotensi memicu gesekan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya ketegangan perdagangan pasca pengumuman keanggotaan Indonesia di BRICS, termasuk kebijakan proteksionis yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia.

Indonesia juga sedang dalam proses aksesi menuju keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah forum ekonomi negara-negara maju. Keanggotaan ganda ini menimbulkan potensi dilema geopolitik dan ekonomi, karena BRICS dan OECD merepresentasikan kepentingan yang berbeda. OECD menekankan standar tata kelola ekonomi yang diadopsi negara maju, sedangkan BRICS menawarkan alternatif kerja sama yang lebih inklusif bagi negara berkembang. Dengan demikian, strategi Indonesia dalam menyeimbangkan posisi di antara dua blok ekonomi besar menjadi sangat krusial agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS pada periode 2023–2024. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan wawancara, serta menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme, Integrasi Ekonomi Regional, dan Kepentingan Nasional sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hubungan internasional sekaligus menawarkan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang relevan, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya menjadi simbol partisipasi dalam blok ekonomi baru, tetapi juga instrumen nyata untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai BRICS dan implikasinya terhadap ekonomi nasional telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti internasional maupun domestik. Nizar Umar dan Dinda Ayuningtyas meneliti keanggotaan Arab Saudi dalam BRICS terhadap implementasi *Vision 2030* dan menemukan bahwa keanggotaan tersebut memberikan dampak positif melalui peningkatan investasi asing langsung (FDI) di sektor strategis (Umar & Ayuningtyas, 2022). Relevansi penelitian ini terletak pada analisis bagaimana BRICS mampu mendukung agenda pembangunan nasional sebuah negara, meskipun fokusnya berbeda dengan Indonesia.

Franciscus Budi Iskandar mengkaji implikasi pembentukan mata uang BRICS terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa keberadaan mata uang bersama BRICS berpotensi mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mendukung stabilitas nilai

tukar rupiah (Iskandar, 2023). Penelitian ini menyoroti aspek moneter, sementara penelitian ini lebih menekankan pada aspek perdagangan, investasi, dan kepentingan ekonomi nasional Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian oleh Eko Nordiansyah mengenai dampak keanggotaan Afrika Selatan dalam BRICS periode 2011–2023 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi dengan negara anggota lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Nordiansyah, 2023). Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena memberikan pembandingan empiris tentang dampak keanggotaan BRICS terhadap negara berkembang lain.

Selain itu, studi oleh Muhammad Wilda Nurifqi et al. menekankan bahwa BRICS memiliki peran substansial dalam mengubah pola perdagangan internasional serta mendorong reformasi lembaga keuangan global (Nurifqi et al., 2022). Sementara itu, Elayne Selma Ashara et al. menganalisis dampak kerja sama BRICS terhadap dominasi dolar AS dan menemukan bahwa meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional menjadi indikasi pergeseran signifikan dalam sistem keuangan global (Ashara et al., 2022).

Di sisi lain, penelitian Alia Rahmatulummah et al. membandingkan peluang ekonomi Indonesia melalui OECD dan BRICS. Mereka menilai bahwa OECD memberikan standar tata kelola ekonomi yang lebih tinggi, sementara BRICS menawarkan forum kerja sama yang lebih inklusif bagi negara berkembang (Rahmatulummah et al., 2023). Penelitian ini relevan karena menyoroti dilema strategis Indonesia dalam menyeimbangkan posisi antara dua blok ekonomi besar.

Neoliberal Institusionalisme

Teori Neoliberal Institusionalisme yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye berargumen bahwa kerja sama antarnegara dapat difasilitasi oleh institusi internasional. Institusi tersebut berperan dalam menciptakan aturan, norma, dan mekanisme yang memungkinkan tercapainya *absolute gain* atau keuntungan absolut bagi setiap negara anggota (Keohane, 1984). Dalam konteks BRICS, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi tersebut menyediakan platform bagi negara anggota untuk memperkuat kerja sama ekonomi, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Indonesia, dengan bergabung ke BRICS, berpotensi memperoleh keuntungan absolut berupa akses pembiayaan pembangunan melalui *New Development Bank* (NDB), peningkatan ekspor, serta diversifikasi mitra dagang. Neoliberal Institusionalisme menekankan bahwa kerja sama multilateral ini bukan sekadar hasil kebetulan, tetapi didorong oleh kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan global.

Integrasi Ekonomi Regional

Teori Integrasi Ekonomi Regional yang dikemukakan oleh Bela Balassa (1961) menekankan tahapan-tahapan integrasi mulai dari zona perdagangan bebas hingga integrasi ekonomi penuh. Integrasi ini memungkinkan terciptanya pasar yang lebih luas, peningkatan daya saing, serta posisi tawar kolektif dalam sistem perdagangan global. Dalam BRICS, meskipun bukan organisasi regional dalam arti geografis, mekanisme kerja samanya dapat dianalisis melalui kerangka integrasi ekonomi. BRICS mendorong harmonisasi kebijakan ekonomi, penghapusan hambatan perdagangan, dan koordinasi investasi antarnegara anggota. Bagi Indonesia, integrasi ini membuka peluang diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan investasi, sekaligus memberikan tantangan berupa potensi ketimpangan struktural dan risiko ketergantungan pada negara dominan seperti Tiongkok.

Kepentingan Nasional (National Interest)

Konsep kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam studi hubungan internasional. Hans Morgenthau (1948) mendefinisikan kepentingan nasional dalam bentuk kekuasaan, yang mencakup keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi kepentingan vital, seperti kedaulatan dan stabilitas ekonomi, serta kepentingan sekunder, seperti kerja sama perdagangan atau diplomasi multilateral (Sudarsono, 2018). Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat dipahami melalui lensa kepentingan nasional. Dari sisi vital, Indonesia ingin memperkuat stabilitas ekonomi melalui diversifikasi mitra dagang dan akses pendanaan alternatif. Dari sisi sekunder, keanggotaan ini diharapkan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam forum ekonomi global. Namun, kepentingan nasional juga menuntut agar risiko geopolitik dan potensi konflik dagang dengan negara-negara Barat tetap diperhitungkan secara strategis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam keanggotaan BRICS terhadap ekonomi nasional pada periode 2023–2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk menggali peluang, tantangan, dan implikasi dari kebijakan keanggotaan Indonesia di BRICS. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta pakar ekonomi yang memiliki kompetensi di bidang kerja sama internasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai

sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi BRICS, dokumen pemerintah, serta pemberitaan media nasional maupun internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, membandingkan temuan, dan menarik implikasi yang relevan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dalam BRICS. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi strategis Indonesia dalam kerja sama ekonomi global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa potensi yang signifikan bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal akses pendanaan, perluasan pasar ekspor, serta penguatan kerja sama investasi. Melalui keanggotaannya, Indonesia memperoleh peluang untuk memanfaatkan fasilitas *New Development Bank*(NDB) yang dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap pendanaan alternatif ini dipandang penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan global yang didominasi Barat seperti Bank Dunia dan IMF. Selain itu, BRICS juga menawarkan potensi penguatan perdagangan dengan negara-negara anggota, di mana tren ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan ke pasar negara-negara BRICS.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peluang dalam diversifikasi mitra dagang. Selama ini, perdagangan Indonesia masih sangat bergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia dapat memperluas jaringan pasar non-tradisional, termasuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang juga semakin terintegrasi dalam kerja sama BRICS. Diversifikasi ini penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal, khususnya dalam menghadapi kebijakan proteksionis negara-negara maju. Di samping peluang, penelitian ini menemukan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, dominasi negara besar seperti Tiongkok dan Rusia dalam struktur BRICS menimbulkan kekhawatiran mengenai ketimpangan kepentingan dan potensi ketergantungan ekonomi baru. Kedua, terdapat risiko persaingan intra-BRICS dalam sektor-sektor strategis, misalnya di bidang industri manufaktur, energi, dan teknologi, yang berpotensi menekan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ketiga, dinamika geopolitik juga menjadi tantangan serius, karena keanggotaan Indonesia

dalam BRICS berpotensi memicu gesekan dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari meningkatnya tensi perdagangan, termasuk kebijakan tarif impor yang diberlakukan terhadap sejumlah produk Indonesia pasca pengumuman keanggotaan penuh.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memunculkan dilema strategis terkait proses akses menuju *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Di satu sisi, OECD menawarkan reputasi dan standar tata kelola ekonomi yang lebih tinggi. Namun, keterlibatan aktif Indonesia dalam BRICS dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan pada blok negara berkembang yang memiliki agenda berbeda dengan OECD. Kondisi ini menuntut strategi diplomasi yang hati-hati agar Indonesia tetap dapat memanfaatkan peluang dari kedua organisasi internasional tanpa terjebak dalam konflik kepentingan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat posisi ekonomi nasional di tingkat global. Namun, manfaat dari keanggotaan ini hanya dapat dirasakan apabila pemerintah mampu mengelola peluang dan risiko secara seimbang melalui kebijakan ekonomi yang adaptif, selektif, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS pada periode 2023–2024 memiliki implikasi terhadap ekonomi nasional. Dari sisi peluang, Indonesia memperoleh akses pembiayaan pembangunan melalui *New Development Bank*, memperluas pasar ekspor non-tradisional, meningkatkan aliran investasi, serta memperkuat posisi tawar dalam tata kelola ekonomi global. Diversifikasi mitra dagang melalui BRICS juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional di Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah risiko atau tantangan yang tidak dapat diabaikan. Dominasi negara besar seperti Tiongkok dan Rusia menimbulkan potensi ketimpangan dalam pengambilan keputusan, sementara persaingan intra-BRICS dalam sektor strategis dapat melemahkan daya saing Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia di BRICS menimbulkan gesekan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang tercermin dalam meningkatnya tensi perdagangan. Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga menimbulkan dilema strategis terhadap akses menuju OECD, mengingat perbedaan orientasi kebijakan ekonomi antara kedua forum internasional tersebut.

Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat memberikan manfaat yang besar apabila dikelola melalui kebijakan yang adaptif, selektif, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Pemerintah perlu menyeimbangkan strategi ekonomi dan diplomasi agar Indonesia mampu mengoptimalkan peluang dari BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan mitra dagang tradisional maupun menghambat proses akses menuju OECD. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukan hanya simbol keterlibatan global, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional apabila dikelola dengan tepat.

BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis yang dilakukan masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu memberikan gambaran kuantitatif yang mendalam mengenai dampak keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap perekonomian nasional. Selain itu, penelitian lebih banyak menggunakan data sekunder sehingga hasilnya cenderung interpretatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih jelas pengaruh keanggotaan Indonesia terhadap indikator ekonomi tertentu, seperti perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kajian mendatang juga dapat memperluas ruang lingkup analisis, misalnya dengan membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara anggota BRICS lain atau dengan menambahkan aspek politik dan keamanan sebagai variabel yang relevan.

DAFTAR REFERENSI

- Sorensen, R. J. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. *Pustaka Pelajar*, 227-228.
- Suara, S. M. (2025). Analisis Faktor Penyebab Indonesia Menjadi Negara Mitra BRICS. *Unimudatorong*.
- Forum, W. E. (2024, November 20). BRICS: Here's what to know about the international bloc. *Geo-Economics and Politics*.
- Yadjib, S. (2024, Oktober 11). *Butol Post*. Retrieved from Pikiran rakyat media network: https://buol.pikiran-rakyat.com/news/pr-3458660419/prabowo-tunjuk-utusan-khusus-untuk-hadiri-ktt-brics-di-rusia?utm_source=chatgpt.com
- Indonesia, B. N. (2024, Oktober 24). *BBC News Indonesia*. Retrieved from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o?utm_source=chatgpt.com

- Hermawan, Y. P. (2025, Januari 6). Keanggotaan Indonesia dalam BRICS perlu strategi antisipasi risiko. *Pacis Unpar*.
- Budiawan Sidik A, N. I. (2024, November 19). Indonesia Gabung BRICS, Amunisi Dedolarisasi dan Kontra Hegemoni Amerika Serikat. *Politik dan Hukum*.
- Gunarwati, D. T. (2025, Januari 7). Indonesia Resmi Masuk BRICS, Ini Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri. *Indonesiamove*.
- New Development Bank, N. (2024). Declaration, B. J. (2023).
- Investing. (2025, Mei 22). Keanggotaan RI di BRICS Buka Peluang Besar untuk Pengembangan Industri. *Warta Ekonomi*(<https://id.investing.com/news/economy-news/keanggotaan-ri-di-brics-buka-peluang-besar-untuk-pengembangan-industri-2792391>).
- Syafrizal, M. A. (2025, Januari 9). Luhut Ungkap Keuntungan Indonesia Masuk BRICS. *Fakta Mewarnai Indonesia*(https://fakta.com/internasional/fkt-21043/luhut-ungkap-keuntungan-indonesia-masuk-brics?utm_source=chatgpt.com).
- Fleming, D. A. (2023). BRICS, geopolitics, and economic dependency: A review of intra-bloc asymmetries and policy implications. *Journal of International Political Economy*, 30, 155-174.
- Eichengreen, B. (2023). The dollar, BRICS currency proposals, and global monetary power. *Journal of International Money and Finance*, 134.
- RI, K. P. (2025, April 16). Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia. *Kemhan* <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html#:~:text=Dimulai%20sejak%202018%2C%20perang%20dagang,telah%20menciptakan%20ketegangan%20ekonomi%20global>
- Petri, P. A. (2020). The economic impact of trade tensions between the United States and China on ASEAN economies. *Asian Economic Papers*, 19, 1-28.
- Candra, A. &. (2021). Dampak impor prouk Cina terhadap industri lokal di Indonesia: Studi kasus sektor manufaktur ringan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12, 47-62.
- Wicaksono, A. (2020). Perdagangan bebas dan tantangan perlindungan pasar domestik: Studi atas hubungan Indonesia-Tiongkok. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 18, 47-62.
- Basri, M. C. (2023). Prospek akses Indonesia ke OECD: Tantangan dan peluang dalam konteks geopolitik global. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18, 1-12.

- Rajah, R. &. (2024). Navigating dual alignments: Indonesia, BRICS, and the OECD dilemma. *Asian Economic Policy Review*, 19, 201-219.
- Budyanto Putro Sudarsono, J. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8 <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>
- Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. In J. A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (Vol. 3rd ed). SAGE Publications.
- Shikha. (2022). The role of BRICS in global governance to promote economic development. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 2310-2152.
- BRICS. (2025). BRICS CONTACT GROUP ON ECONOMIC AND TRADE ISSUES (CGETI). *BRICS Official*.
- Kemhan. (2025, Februari 4). INDONESIA BERGABUNG DENGAN BRICS, APA MANFAAT SERTA KERUGIANNYA, DAN BAGAIMANA STRATEGI PELAKSANAANNYA? *Kementerian Pertahanan RI*.
- BRICS. (2025, Januari 20). About the BRICS. *BRICS Brasil*(<https://brics.br/en/about-the-brics>).
- Ferragamo, M. (2025, Juni 26). What Is the BRICS Group and Why Is It Expanding? *Council on Foreign Relations*.
- KemluRI. (2024, Oktober 24). Sampaikan Keinginan Bergabung Dengan BRICS, Indonesia Tegaskan Dukungan untuk Memajukan Kepentingan Negara Berkembang. *Kementerian Luar Negeri Republik Indoneisa*.
- Stuenkel. (2015). The BRICS and the Future of Global Order. *Lexington Books*.
- Morgenthau, H. J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. *Alfred A. Knopf*.
- O'Neil, J. (2011). Building Better Global Economic BRICs. *Goldman Sachs Global Economics Paper*, 66.
- Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. (2024). Indonesia's Foreign Policy: Strategic Direction. Retrieved from <https://kemlu.go.id>.
- Rajan, R. (2024). Emerging Market Competitiveness: Challenges in BRICS. *Global Development Review*, 18, 55-71.
- World Bank. (2024). Commodity Markets Outlook. etrieved from <https://www.worldbank.org>.
- Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. *Columbia University Press*.

- ASEAN Secretariat. (2023). Indonesia's Economic Outlook in the Global Context. *ASEAN Economic Report*.
- BRICS Women's Business Alliance. (2022). Annual Report on Women and Economic Empowerment.
- UN Women. (2021). South–South Cooperation for Gender Equality and Women's Empowerment.
- UNDP. (2023). Sustainable Development Goals Report. *United Nations Development Programme*.
- Hatam, A. (2025, Juli 3). Ekspor Indonesia Naik Tajam di Mei 2025, Ditopang Komoditas Unggulan dan Pasar Global. *Financial Review*.